



Sekolah Dibuka, Muncul Ribuan Klaster

JAKARTA—Sebanyak 1.296 sekolah di Indonesia melaporkan munculnya klaster Covid-19 setelah sekolah membuka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas.

*Sirojul Khafid, Sugeng Pranyoto, & Imam Yuda
redaksi@jibnews.co*

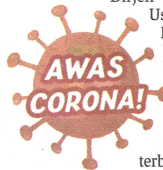
► Sebanyak 46.500 sekolah sudah menggelar PTM Terbatas per 20 September 2021.

► Pembukaan sekolah demi mengejar ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi Covid-19.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat sebanyak 11.615 siswa dinyatakan positif Covid-19.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Paud Dikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri, menyebut data ini didapatkan dari 46.500 sekolah yang sudah menggelar PTM terbatas per 20 September 2021. "Kasus penularan kira-kira 2,78 persen yang melaporkan," kata Jumeri, Rabu (22/9).

Ia merinci jumlah klaster Covid-19 paling banyak ada di Sekolah Dasar (SD) sebanyak 581 sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 525 sekolah, dan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 241 sekolah.



Sekolah Dibuka,...

Sementara di Sekolah Menengah Atas (SMA) ada 170 sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 70 sekolah, dan di Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 13 sekolah.

Pelajar SD menjadi yang paling banyak terkena Covid-19 akibat PTM Terbatas yakni sebanyak 6.908 orang, dan 3.174 guru SD juga positif Covid-19.

Di tingkat SMP terdapat 2.220 siswa dan 1.502 guru positif Covid-19, PAUD terdapat 953 siswa dan 2.007 positif Covid-19.

Lalu, 1.915 guru dan 794 siswa SMA positif Covid-19, 609 siswa dan 1.594 guru SMK positif Covid-19, dan 131 siswa dan 112 guru SLB positif Covid-19.

Meski begitu, Jumeri tetap mendorong pembukaan sekolah demi mengejar ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi Covid-19. Saat ini baru 42% dari total 540.979 sekolah di Indonesia yang sudah dibuka untuk PTM Terbatas.

"Kami butuh dukungan dari daerah untuk memperbolehkan sekolah di PPKM level 1-3 untuk segera membuka PTM Terbatas, Dinas Kesehatan masing-masing daerah juga untuk mengakselerasi vaksinasi tenaga pendidik yang sudah menjadi prioritas," kata Jumeri.

Dua Jam

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Aman Bhakti Pulungan, menjelaskan pilihan sekolah tatap muka saat ini memang diperlukan di tengah *positivity rate* yang sudah menurun. Menurut dia, ambang batas sekolah kembali disetop jika *positivity rate* kembali meningkat di atas standar ideal World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia.

"Kalau *positivity rate* di atas 8 persen lagi, dan juga ada kasus, disetop dulu, sekarang masih di bawah 8 persen," kata dia.

Aman juga meminta setiap sekolah mengevaluasi secara berkala. Contohnya dalam waktu pembelajaran, sekolah tatap muka maksimal hanya digelar dua jam. Temuan kelonggaran PTM disebut Aman masih ditemukan di

beberapa sekolah. "Jadi misalnya harusnya [maksimal] sampai dua jam mereka *extend* sampai lima sampai enam jam harusnya itu tidak ada. Maksimal dua jam, dan itu harusnya dievaluasi," katanya.

Level 2

Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mengatakan pembukaan sekolah seperti saat ini memang harus diutamakan dibandingkan sektor lainnya. Namun, jika muncul klaster-klaster penularan baru seperti ini, sebaiknya sekolah harus ditutup sementara.

"Tetapi prinsipnya bahwa sekolah harus diutamakan dibuka dibandingkan yang lain. Namun, sebagai jaring pengaman ketika ditemukan klaster minimal dua kasus di sekolah, ya itu harus ditutup dulu untuk desinfeksi serta penguatan 3T, termasuk melacak ini dari mana [klaster penularan]," jelas Dicky.

Meski pembukaan sekolah ini sangat dibutuhkan, kata Dicky, pemerintah tetap harus mengutamakan keselamatan dan keamanan peserta didik. Maka dari itu, rem darurat harus segera dilakukan untuk melacak asal penularannya.

Menurutnya, penularan virus Corona pada anak masih bisa terjadi, salah satu penyebabnya bisa dipengaruhi oleh laju penularan di lokasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu mengevaluasi aturan PPKM yang membolehkan PTM di sekolah.

"Jadi, menurut saya kalau dievaluasi PPKM level 3 ini belum bisa menjamin keamanan tatap muka sekolah, ya turunkan ke PPKM level 2 baru bisa," kata Dicky.

"Makanya, di sekolah yang ada satu kasus infeksi ini harus betul-betul dikaji dan dicari tahu dari mana sumbernya dan bagaimana penularannya."

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, memerintahkan agar seluruh daerah di wilayahnya melakukan *random test* atau tes acak Covid-19 terhadap sekolah-sekolah yang menggelar PTM.

Instruksi tersebut dikeluarkan

Ganjar menyusul munculnya kasus penularan atau klaster Covid-19 dari kegiatan PTM di sebuah sekolah di Kabupaten Purbalingga. Klaster PTM di Purbalingga itu terjadi di SMPN 4 Mrebet. Total ada sekitar 90 siswa dari klaster tersebut yang dinyatakan positif terpapar Covid-19.

Persiapan PTM

Sementara itu, mayoritas SD dan SMP negeri di Kota Jogja sudah menggelar PTM. Secara legalitas, Pemerintah Kota Jogja sudah membolehkan sekolah yang siap secara sarana prasarana dan sistem untuk membuka PTM. Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Jogja, Budi Asrori, sudah ada verifikasi untuk sekolah-sekolah terkait dengan kesiapan sekolah.

Selain sekolah negeri, sejumlah sekolah swasta juga telah melaksanakan PTM. Apabila persyaratan sudah ada, sekolah bisa membuka PTM dengan membuat pernyataan kesiapan dari kepala sekolah dan persetujuan orang tua peserta didik.

"Dari sisi persetujuan, lebih dari 90 persen wali murid peserta didik setuju [anaknyanya] untuk hadir dalam PTM," kata Budi.

Peserta didik akan berangkat ke sekolah untuk PTM secara bergantian. Kapasitas kelas hanya 50% dengan durasi waktu belajar maksimal tiga jam. Sebelum esok harinya berangkat, sekolah akan melakukan skrining wawancara. Skrining ini terkait dengan kondisi terkini anak. Apabila ada gejala atau di lingkungan keluarganya terdapat orang yang positif Covid-19, anak tidak boleh masuk PTM.

"[Apabila sampai di sekolah ditemukan gejala Covid-19], sekolah menyediakan ruang isolasi sementara. Ruang ini berbeda dengan Unit Kesehatan Sekolah. [Setelah itu] orang tua peserta didik dihubungi untuk menjemput anaknya dan dibawa ke fasilitas kesehatan," kata Budi.

"Misal ada yang positif, maka kami minta sekolah melakukan *tracing* pada orang terdekat yang interaksi. PTM akan dihentikan untuk memutus penyebaran."

(JIBI/Suara/Detik)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005